



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

PERENCANAAN KINERJA
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang berdasarkan APBD Perubahan tahun anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2018
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertipikat	33,80 %
2.	Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan	100%
3.	Menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan	100%
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan	Cakupan pelayanan kedinasan	100%
		Aplikasi PATEN	100%
5.	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah	10
6.	Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar pemerintah daerah	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%
8.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%
9.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	B
11.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional	100%
12.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun.	100%
		Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat	100%
13.	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	100%
14.	Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100%
15.	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Website milik Pemda	8 Website
16.	Meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan,	Persentase desa tertib administrasi pelaksana raskin	39,8%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa	0,5 %
		Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	218 LKM
17.	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase Peningkatan PAD	12,00%
18.	Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%
19.	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	100%
20.	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa	100%
21.	Meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%
22.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	100%
23.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	100%
24.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%
25.	Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Cakupan pelayanan kedinasan	100%
26.	Meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa	19 Jam/ Hari

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	kepada masyarakat	seperti majalah, radio, dan televisi	
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan	100 peserta
27.	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan kerjasama dengan media massa	100%
28.	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.	Opini BPK "WTP"	WTP
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2018.

Pada Penetapan Perubahan Kinerja tahun 2018 Sekretariat Daerah dalam melaksanakan 28 (dua puluh delapan) sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebanyak 35 indikator kinerja, dimana terdapat 7 indikator merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah, 6 Indikator merupakan IKU Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD dan 1 indikator merupakan IKU yang tertuang dalam Rensta dan RPJMD. Untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja maka dianggarkan program-program sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2018
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	90.850.000
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	257.916.000

No	Program	Anggaran
1	2	3
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	280.538.300
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	0.00
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	130.729.000
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	53.500.000
7	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	140.326.000
8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.707.515.600
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	370.446.315
10	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	79.915.000
11	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	106.802.000
12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	206.126.900
13	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	42.496.000
14	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	1.056.854.000
15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	165.000.000
16	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	320.450.000
17	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	1.698.106.500
18	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.759.268.500
19	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	81.312.000
20	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	976.808.000
21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	39.861.000
JUMLAH :		9.564.821.115

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2018.

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebanyak 21 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp 9.564.281.115,00 secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang bersumberkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2018, dan tidak terdapat anggaran yang bersumber pada APBN dan BLN.

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran strategis, maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per sasaran strategis Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2018
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertipikat	33,80 %	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	42.496.000	0,44
2.	Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan	100%			
3.	Menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan	100%			
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	53.500.000	0,56
		Aplikasi PATEN	100%			
5.	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah	10	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	81.312.000	0,85
6.	Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi anatar pemerintah daerah	100%	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	39.861.000	0,42
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	Program Peningkatan Partisipasi	206.126.900	2,16

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
	desa			Masyarakat Dalam Membangun Desa		
8.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%			
9.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%			
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	B	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	320.450.000	3,35
11.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	100%			
		Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional	100%			
12.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun.	100%			
		Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat	100%			
13.	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	100%	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	976.808.000	10,21
14.	Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100%			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
15.	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Website milik Pemda	8 Website			
16.	Meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Persentase desa tertib administrasi pelaksana raskin	39,8%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	0.00	0,00
		Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa	0,5 %	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	140.326.000	1,47
		Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	218 LKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	106.802.000	1,12
17.	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase Peningkatan PAD	12,02%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	370.446.315	3,87
18.	Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%			
19.	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	100%			
20.	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.759.268.500	18,39
21.	Meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	Program Promosi Kesehatan dan	165.000.000	1,73

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
22.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	100%	Pemberdayaan masyarakat		
23.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	100%	-	-	
24.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	1.698.106.500	17,75
25.	Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.707.515.600	17,85
26.	Meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	19 Jam/ Hari	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	130.729.000	1,37
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan	155 peserta	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	79.915.000	0,84

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
27.	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan kerjasama dengan media massa	100%	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	1.056.854.000	11,05
28.	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.	Opini BPK "WTP"	WTP	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	280.538.300	2,93
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.281.526.600	44,76
Jumlah :					9.564.821.115	100%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2018 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dukungan pendanaan dalam mencapai sasaran strategis untuk mencapai target dari tiap indikator kinerja sasaran strategis.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2018. Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

AKUNTABILITAS
KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Organisasi.
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja 2018

A. Pengukuran Kinerja Organisasi

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2018 pada anggaran perubahan dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu : *indikator positif* dan *indikator negatif*, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

➤ *Indikator Positif* apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:

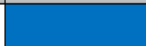




$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

➤ *Indikator Negatif* apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, pemberian warna untuk mempermudah dalam membaca kriteria penilaian

2. Capaian Kinerja Sasaran

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018 dan target kinerja hingga akhir periode Renstra Sekretariat Daerah pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap p 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertipikat	39,37%	33,8%	54,41%	160,97	33,83%	160,83	IKU Kab.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
3.	Menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Aplikasi PATEN	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
5.	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama kerjasama daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah	38	25	38	152.00	25	152.00	
6.	Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi anatar pemerintah daerah	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
8.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
9.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	CC	B	CC	50.00	B	50.00	IKU Setda, IKU Kab.
11.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional	97,36%	100%	84,61%	84,61	100%	84,61	
12.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan public	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun.	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Kab.
13.	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
14.	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
16.	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Website milik Pemda	8 Website	8 Website	8 Website	100.00	8 Website	100.00	
17.	Meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Persentase desa tertib administrasi pelaksana raskin	39,8%	39,8%	40 %	100.50	39,8%	100.50	
		Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa	0,33 %	0,5 %	0,19%	60.00	0,5 %	60.00	
		Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	182 LKM	218 LKM	218 LKM	166,9	109 LKM	166,9	IKU Setda
18.	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase Peningkatan PAD	7,42%	12.02%	17,89%	148,84	12,02%	148,84	
19.	Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	7,42%	12.02%	17,89%	148,84	12,02%	148,84	IKU Kab.
21.	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
22.	Meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
23.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
24.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
26.	Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
27.	Meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	19 Jam/ Hari	19 Jam/ Hari	19 Jam/ Hari	100.00	19 Jam/ Hari	100.00	
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan	76 peserta	100 peserta	152 peserta	152	100 peserta	152	
28.	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi	Cakupan kerjasama dengan media massa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Seda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	masyarakat dalam pembangunan								
29.	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Cakupan pengadaan pakaian dinas aparatur	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Opini BPK "WTP"	WTP	WTP	WTP	100.00	WTP	100.00	IKU Kab.
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis :						106,06		106,05	

Sumber : Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2018

Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Target Indikator	
			2018	2019 (RPJMD)
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	34 (91,89%)	34 (91,89%)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	1 (2,70%)	1 (2,70%)
3	66 % ≤ 75%	Sedang	0	0
4	51% ≤ 65%	Rendah	1 (2,70%)	1 (2,70%)
5	≤ 50	Sangat Rendah	1 (2,70%)	1 (2,70%)

Berdasarkan tabel 3.2 rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2018 telah mencapai 106,06% (*Sangat Tinggi*) dibandingkan dengan target tahun 2019 pada akhir periode Renstra dengan capaian 106,05% (*Sangat Tinggi*), maka capaian tahun 2018 tidak terlalu jauh dari capaian tahun 2019.

Berdasarkan tabel 3.3 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2018 tertinggi adalah 34 (91,89%) indikator dengan capaian Sangat Tinggi dan yang terendah pada capaian indikator tinggi 0

(0 %) dan indikator sedang 0 (0 %). Sedangkan capaian indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2018 dibandingkan dengan target tahun 2019 pada akhir

Sumber : Bagian Organisasi 2018, data diolah periode Renstra.

3. Realisasi Keuangan tahun 2018

Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasaran strategis pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran per Program
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2018

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program peningkatan disiplin aparatur	90.850.000	90.603.100	99,73
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	257.916.000	182.298.119	70,68
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	280.538.300	273.211.565	97,39

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	0	0	0
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	130.729.000	128.005.875	97,92
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	53.500.000	52.299.400	97,76
7	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	140.326.000	137.427.543	97,93
8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.707.515.600	1.609.826.368	94,28
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	370.446.315	350.621.125	94,65
10	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	79.915.000	79.349.950	99,29
11	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	106.802.000	101.776.425	95,29
12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	206.126.900	194.366.296	94,29
13	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	42.496.000	40.164.460	94,51
14	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	1.056.854.000	992.138.025	93,88
15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	165.000.000	164.957.650	99,97
16	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	320.450.000	313.594.625	97,86
17	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	1.698.106.500	1.683.515.070	99,14
18	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.759.268.500	1.629.779.738	92,64
19	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	81.312.020	72.561.035	89,24
20	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	976.808.000	857.016.151	87,74
21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	39.861.000	1.832.948	4,60
Sub Jumlah (Belanja Non Eks BAU) :		9.564.821.115	8.955.345.468	93,63
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.223.201.000	5.797.402.081	93,16
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.281.526.600	4.155.943.846	97,07
Sub Jumlah (Belanja Eks BAU) :		10.504.727.600	9.953.345.927	94,75
Jumlah :		20.069.548.715	18.908.691.395	94,22

Sumber : SIMDA Kabupaten Magelang 2018

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang didukung 21 program dengan jumlah anggaran Rp 9.564.821.115 realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp 8.955.345.468 (93,63%), persentase realisasi keuangan masuk dalam katagori *Sangat tinggi*, tetapi masih terdapat 1 (satu) program dengan capaian kurang dari 75%, yaitu Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan realisasi anggaran 4,60% (Katagori sangat rendah) dan 1 (satu) program yang sama sekali tidak memiliki pagu anggaran, yaitu Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Pada kegiatan eks BAU terdapat 2 (dua) program dengan pagu anggaran Rp. 10.504.727.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.953.345.927 (94,75%). Sehingga total anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 20.069.548.715 dengan realisasi anggaran Rp. 18.908.691.395 (94,22), realisasi anggaran tersebut masuk dalam katagorin sangat tinggi.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2018 terhadap 28 (dua puluh delapan) sasaran strategis dan 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh ke delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Penetapan Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2014-2019. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun IV dari Renstra Sekretariat Daerah 2014-2019.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2018 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran strategis, dimana pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis meningkatnya sistem pendaftaran tanah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1.	Meningkatnya sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertipikat	33,80%	33,8%	54,41%	160,97	33,83%	160,83	IKU Kab.
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						160,97	160,83	.	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya sistem pendaftaran tanah telah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 160,97% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 160,58 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Partisipasi dan kesadaran masyarakat masyarakat yang meningkat terhadap pendaftaran dan pensertifikatan tanah, ditunjang dengan adanya program pemerintah untuk melaksanakan sertifikat tanah masal.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp 42.496.000 dengan realisasi anggaran RP 40.164.460 (94,51%), program ini untuk menunjang pencapaian sasaran strategis : meningkatnya sistem pendaftaran tanah, meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan dan menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan.

2. Sasaran Strategis meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
2.	Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan	100%	100%	100%	100	100%	100	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100		100	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya koordinasi tertib administrasi telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Partisipasi dan kesadaran masyarakat masyarakat yang meningkat terhadap pendaftaran dan pensertifikatan tanah, ditunjang dengan adanya program pemerintah untuk melaksanakan sertifikat tanah masal.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp 42.496.000 dengan realisasi anggaran RP 40.164.460 (94,51%), program ini untuk menunjang pencapaian sasaran strategis : meningkatnya sistem pendaftaran tanah, meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan dan menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan.

3. Sasaran strategis menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
3.	Menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan	100%	100%	100%	100	100%	100	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100		100	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis strategis menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Partisipasi dan kesadaran masyarakat masyarakat yang meningkat terhadap pendaftaran dan pensertifikatan tanah, ditunjang dengan adanya program pemerintah untuk melaksanakan sertifikat tanah masal, hal ini dapat meminimalisasi terjadinya konflik pertanahan.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp 42.496.000 dengan realisasi anggaran RP 40.164.460 (94,51%), program ini untuk menunjang pencapaian sasaran strategis : meningkatnya sistem pendaftaran tanah, meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan dan menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan.

4. Sasaran Strategis meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	100%	100%	100	100%	100	
		Aplikasi PATEN	100%	100%	100%	100	100%	100	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Adanya aplikasi PATEN meningkatkan mutu layanan kecamatan kepada masyarakat sehingga meningkatkan cakupan pelayanan kedinasan dapat tercapai.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Rp 53.500.000 dengan realisasi anggaran RP 52.299.400 (97,76%).

5. Sasaran Strategis meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
5.	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah	38	25	38	152	25	152	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						152		152	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis Strategis meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 152% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 152 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Adanya iktikad yang baik dari lembaga yang terkait kerjasama memperlancar proses pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga capaian kerjasama dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah :

- 1) Rendahnya pemahaman SKPD akan pentingnya kerjasama antar daerah.
- 2) Kesepakatan bersama yang tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama sehingga kesepakatan bersama tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kerjasama antar daerah.
- 3) Kurangnya peran aktif para pihak yang bekerjasama untuk memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan.

Alternatif solusinya adalah mendorong SKPD terkait pelaksanaan teknis perjanjian kerjasama agar kesepakatan bersama segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama serta adanya komitmen bersama untuk memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp 81.312.020 dengan realisasi anggaran RP 72.561.035 (89,24%).

6. Sasaran Strategis meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
6.	Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi anatar pemerintah daerah	100%	100%	100%	100	100%	100	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : kesepahamam dalam menyelesaikan batas wilayah antar pemerintah daerah memperlancar proses penentuan tapal batas dan adanya fasilitasi dari pihak terkait termasuk dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah terkait dengan permasalahan penegasan batas dengan Kota Magelang pada sisi selatan yang berbatasan dengan Desa Mertoyudan, Desa Banyurojo dan Desa Bulurejo di Kecamatan Mertoyudan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak adanya kesepakatan atas penggunaan dokumen sebagai dasar penegasan.
Pemerintah Kabupaten Magelang berpedoman pada dokumen peta desa lama (*menut-plan*) yang dimiliki oleh masing-masing desa. Sedangkan Pemerintah Kota Magelang menyusun peta baru berdasarkan kondisi saat ini (*existing*) tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yang digunakan sebagai dasar penegasan batas.
- b. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyampaikan kronologis permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang ke Gubernur Jawa Tengah. Sehingga saat ini permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang pada tataran mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Alternatif solusinya adalah tetap melaksanakan koordinasi vertikal, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp 39.861.000 dengan realisasi anggaran RP 1.832.948 (4,60%).

7. Sasaran Strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
7.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Adanya kucuran dana dari pemerintah Pusat maupu daerah yang cukup memadai, didukung meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Alternatif solusinya adalah dengan menyesuaikan dengan regulasi yang baru.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis yaitu program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa sebesar Rp 206.126.900 dengan realisasi anggaran RP 194.366.296 (94,29%). Program ini menunjang 3 sasaran strategis terdiri dari : peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa dan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa.

8. Sasaran Strategis meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
8.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desatelah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Adanya petugas pendamping pengelolaan keuangan desa

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah :

1. Keterlambatan pencairan dana desa yang disebabkan terlambatnya pengiriman syarat pencairan
2. Terdapat banyak kekurangan data, seperti pergantian masa jabatan, pengiriman berkas terlambat

Alternatif solusinya adalah dengan pemberian fasilitasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan desa.

9. Sasaran Strategis meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
9.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan :

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah : Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Desa, sehingga diklat yang diberikan kurang berdaya ungkit;

Alternatif solusinya adalah dengan pendampingan langsung kepada desa

10. Sasaran Strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	CC	B	CC	50.00	B	50.00	IKU Setda, IKU Kab.
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						50.00		50.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah belum mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 50% (Sangat rendah) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 50% (Sangat rendah).

Permasalahan : Secara umum, Pemerintah Kabupaten Magelang belum secara intensif melakukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berbagai komponen penilaian AKIP, masih mengandung banyak kelemahan, antara lain :

1. RPJMD dan Renstra pada masing-masing SKPD masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan dan terukur sebagai alat untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target;
2. Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD/Renstra belum dilengkapi dengan indikator sebagai ukuran keberhasilan;
3. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan outcome yang terukur;

4. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi, dan target-target yang ingin dicapai;
5. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program;
6. Sistem evaluasi belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

Alternatif solusinya adalah :

1. Melakukan revisi/perubahan pada dokumen Renstra.
2. Reviu mencakup reviu tujuan dan sasaran, dengan dilengkapi IKU yang relevan, spesifik, dan terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing satuan kerja.
3. Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dengan mewajibkan SKPD untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan PK sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya.
4. Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sanksi;
5. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan sebesar Rp 320.450.000 dengan realisasi anggaran RP 313.594.625 (97,86%). Program ini menunjang capaian 2 sasaran strategis, yaitu : meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah dan meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah.

Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sebesar 59,05 dengan katagori CC, dibandingkan dengan tahun 2017 dengan nilai 58,82 dengan katagori CC mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,23 point, tetapi tidak mengalami peningkatan katagori, target nilai AKIP pada RPJMD adalah diatas 60 dengan katagori B. Pengukuran indikator kinerja kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut :

Tabel 3.5
Penghitungan Nilai AKIP Kabupaten Magelang tahun 2018.

No.	Nilai SAKIP	Bobot Nilai
1	AA	6
2	A	5
3	BB	4
4	B	3
5	CC	2
6	C	1
7	D	0

Penghitungan capaian kinerja : Target B, Realisasi CC

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Jumlah bobot nilai Realisasi} \times 100}{\text{Jumlah bobot nilai target}}$$

$$= \text{CC/B} \times 100$$

$$= (2+1+0) / (3+2+1+0) \times 100$$

$$= 3/6 \times 100$$

$$= 50\%$$

11. Sasaran Strategis meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
11.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100	100%	100	
		Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional	100%	100%	84,61%	85	100%	84,61	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Telah dilakukan penataan terhadap OPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah momor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah belum dilaksanakan
2. Penyusunan dokumen Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial terkendala dengan kesibukan tim penyusun yang telah memiliki tugas utama pada masing-masing SKPD, sehingga waktu penyelesaian mengalami keterlambatan.

Alternatif solusi terhadap permasalahan di atas adalah melaksanakan upaya koordinasi intensif, baik dengan SKPD maupun dengan tim penyusun.

12. Sasaran Strategis meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
12.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan public	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun.	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
		Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Kab.
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						<i>100.00</i>		<i>100.00</i>	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan public telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan :

Permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan *e-office*, yang pelaksanaannya tergantung dengan aplikasi, sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, sehingga belum bisa diaplikasikan secara menyeluruh.

Alternatif solusinya adalah dengan menerapkannya pada SKPD yang telah siap (gradual/bertahap).

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rp 320.450.000 dengan realisasi anggaran RP 313.594.625 (97,86%) .

Survei IKM Tahun 2018 dilaksanakan pada 150 (seratus lima puluh) Unit Pelayanan Publik yang dikelompokkan dalam 6 (enam) rumpun Unit Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat secara kumulatif tahun 2018 adalah 78,32 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh dua). Hal ini menunjukkan secara umum kualitas pelayanan Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang masuk kategori Baik (62,51 – 81,25).

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat secara kumulatif tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,15 (nol koma lima belas) dari Indeks Kepuasan Masyarakat tahun sebelumnya (2017) yang memperoleh nilai IKM sebesar 77,10 menjadi 83,25.

13. Sasaran Strategis meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
13.	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Koordinasi dan konsolidasi coordinator kepegawaian di tiap bagian dalam proses pengurusan berkas kepegawaian.

Permasalahan yang dihadapi adalah terkait akses ke Sistem Informasi Kepegawaian (SIPGAN) dan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Aparatur (SINAR), sehingga ada sebagian pegawai yang belum menerima bukti Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

Alternatif solusinya adalah dengan mempersiapkan jauh-jauh hari terhadap kelengkapan berkas pegawai untuk mengantisipasi gangguan akses ke aplikasi.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis yaitu program : Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 90.850.000 dengan realisasi anggaran RP. 90.603.100 (99,73%) .

14. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
14.	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian

hukum, keadilan, dan supremasi hukum telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Pengkajian hukum dilakukan secara berjenjang disesuaikan dengan kebutuhan produk hukum dan perkembangan peraturan yang berlaku.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah :

1. Dalam pelaksanaan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah, sering tidak ada tindak lanjut dari SKPD terkait hasil kajian dan evaluasi;
2. Penggandaan Peraturan Daerah menunggu Penetapan dari Bupati;
3. Belum adanya Pengelola JDIH yang bersertifikat;
4. Proses penandatanganan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati memakan waktu yang lama di tingkat Bupati;
5. SKPD di dalam mengirim draft ke Bagian Hukum waktunya terlalu mendekati jadwal pembahasan di DPRD, sehingga pembahasan di Bagian Hukum terlalu singkat;
6. Proses evaluasi Raperda ke Kemenkeu prosesnya sangat lama.

Alternatif solusinya adalah terkait permasalahan-permasalahan di atas adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait produk hukum daerah yang dikaji dan dievaluasi;
2. Melaksanakan monitoring terhadap proses
3. Upaya koordinasi dengan SKPD penggagas Rancangan Peraturan penetapan Peraturan Daerah dari Bupati;
4. Diikutsertakannya pengelola JDIH dalam diklat;
5. Memonitoring proses penandatanganan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
6. Melaksanakan Daerah sehingga pengiriman draft nya tidak mendekati jadwal pembahasan di DPRD.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan pertanahan Rp. 976.808.000 dengan realisasi anggaran RP. 857.016.151 (87,74 %), program ini untuk menunjang 3 sasaran strategis yaitu : meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum, meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan



Penerimaan Penghargaan Kabupaten/Kota
Peduli Hak Asasi Manusia

hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum dan meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum.

15. Sasaran Strategis meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
15.	Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hokum.	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>			100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Penyelesaian masalah hukum dapat terselesaikan dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait.
Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah bahwa jumlah perkara yang masuk tidak bisa diprediksikan sebelumnya, belum adanya Perpres RANHAM terbaru sebagai acuan kegiatan sehingga berpengaruh terhadap sasaran kegiatan, serta keterbatasan anggaran dan SDM yang menangani perkara.

Alternatif solusi terkait permasalahan-permasalahan di atas adalah:

1. Mengikuti Bimtek Kepengacaraan untuk aparatur PNS, khususnya PNS di Subbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;
 2. Penambahan anggaran di perubahan;
 3. Menunggu Perpres terbaru, namun kegiatan tetap dilaksanakan.
16. Sasaran Strategis meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
16.	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Website milik Pemda	8 Website	8 Website			8 Website		
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>			8 Website	8 Website			8 Website		

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Telah tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak dalam pengelolaan JDIH

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah website JDIH sering terkena *malware* ataupun kena *hack* yang tidak bisa diperbaiki dalam 1-2 minggu sehingga menghambat penyediaan informasi produk hukum terbaru.

Alternatif solusi terkait permasalahan di atas adalah pemasangan perlindungan dari serangan *malware*.

17. Sasaran Strategis meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
17.	Meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Persentase desa tertib administrasi pelaksana raskin	39,8%	39,80%	40 %	100.50	39,80%	100.50	Pindah pengelola kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA)
		Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa	0,33 %	0,50%	0,19%	60	0,50%	60	
		Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	182 LKM	218 LKM	218 LKM	167,0	109 LKM	166,9	IKU Setda
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						109,16		109,13%	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 109,16% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 109,13% (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Dukungan dan semangat lembaga ekonomi masyarakat dalam pengembangan ekonomi mikro.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang program Raskin;
2. Keterbatasan data pendukung terkait laju inflasi;
3. Kualitas SDM pengelola LKM masih rendah;
4. Penyerapan rendah karena penafsiran terhadap PMK yang masih beragam, serta adanya peraturan tentang Hibah Bansos, dimana penerima bantuan harus berbadan hukum;

Alternatif solusi terkait permasalahan-permasalahan di atas adalah :

1. Sosialisasi intensif peraturan distribusi Raskin;
2. Koordinasi dan penekanan kepada masing-masing SKPD untuk selalu memberika data-data ter update terkait inflasi di Kabupaten Magelang;
3. Studi komparasi ke kabupaten/kota yang telah melaksanakan, serta melakukan pendampingan agar LKM berbadan hukum;
4. Sosialisasi dan pendampingan kepada SKPD agar persepsi terhadap PMK bisa seragam.

18. Sasaran Strategis meningkatnya kinerja BUMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
18.	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase Peningkatan PAD	7,42%	12,02%	17,89%	149	12,02%	148,84	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						149		148,84	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah melebihi mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 149 % (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 148,84% (Sangat tinggi).

Permasalahan yang dihadapi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkaitan dengan pengelolaan BUMD sampai dengan sekarang belum ada.

Alternatif solusi mendesak Pemerintah Pusat agar segera mengeluarkan regulasi Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan pengelolaan BUMD.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 370.446.315 dengan realisasi anggaran RP 350.621.125 (94,65%), program tersebut untuk menunjang 3 sasaran strategis, yaitu : meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan dan meningkatnya kualitas pelaporan, analisis pelaksanaan pembangunan dan meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan.

19. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
19.	Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Tersedianya aplikasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dan kinerja

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah :

1. Output/hasil laporan pelaksanaan belanja APBD yang berasal dari aplikasi belum sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan.
2. Kesiapan data detail program per paket pekerjaan untuk memperlancar proses pengadaan.
3. Aplikasi pengendali kinerja konstruksi belum sepenuhnya berjalan.

Alternatif solusi terkait permasalahan-permasalahan di atas adalah mengupayakan penyempurnaan aplikasi pelaporan belanja APBD dan pembuatan *data base* dan aplikasi/sistem informasi yang memantau dan mengendalikan pekerjaan konstruksi dan sosialisasi/pelatihan aplikasi.

20. Sasaran Strategis meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
20.	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	7,42%	12.02%	17,89%	149	12,02%	148,84	IKU Kab.
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						149		148,84	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah melebihi mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 149 % (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 148,84% (Sangat tinggi).

Permasalahan yang dihadapi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkaitan dengan pengelolaan BUMD sampai dengan sekarang belum ada.

Alternatif solusi mendesak Pemerintah Pusat agar segera mengeluarkan regulasi Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan pengelolaan BUMD.

21. Sasaran Strategis meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
21.	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan :

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah:

1. Terkait dengan pengelolaan LPSE, aplikasi perlu di *upgrade* namun hal tersebut belum merupakan kewajiban.
2. Banyak penyedia jasa konstruksi yang belum paham dengan permasalahan administrasi.

Alternatif solusi terkait permasalahan-permasalahan di atas adalah :

1. Menunggu surat edaran kewajiban untuk melakukan upgrade aplikasi dari provinsi.
2. Mengundang narasumber untuk memberikan pembinaan terkait administrasi pengelolaan penyedia jasa konstruksi.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis menunjang 2 sasaran strategis, yaitu : meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa dan meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat.

22. Sasaran Strategis meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
22.	Meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Masyarakat telah memahami proses pengusulan proposal dan proses pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah terkait lamanya proses persetujuan terhadap proposal bansos yang diajukan, sehingga **alternatif solusinya** adalah dengan melakukan koordinasi intensif dan memberikan informasi sejak awal kepada pengaju proposal di dalam melengkapi berkas yang akan diajukan.

23. Sasaran Strategis meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
23.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>			<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100.00</i>	<i>100%</i>	<i>100.00</i>	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis Strategis meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah terkait dengan acuan bagi penerima hibah bansos yang harus memiliki badan hukum serta kesulitan di dalam menghimpun SPJ dari penerima bansos.

Alternatif solusi terkait permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan koordinasi, pendampingan, pemberian pemahaman secara intensif kepada penerima bansos, sehingga setelah menerima bantuan segera memenuhi kewajibannya dengan menyusun SPJ.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Rp. 165 0 0 dengan realisasi anggaran Rp. 164,674,160 (99,80).

24. Sasaran Strategis Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
24.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Penyusunan kebijakan dapat terlaksana berkat kerjasama dengan SKPD terkait, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah terkait dengan keterbatasan anggaran untuk membiayai kegiatan.

Alternatif solusi terkait permasalahan tersebut adalah dengan penambahan anggaran, sehingga jangkauan kegiatan bisa semakin luas. Misal terkait dengan kegiatan Pengarusutamaan Gender, dengan adanya penambahan anggaran, maka desa yang diberikan sosialisasi terkait dengan pencegahan KDRT akan semakin banyak. Demikian pula dengan kegiatan penguatan Kelembagaan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), dengan adanya penambahan anggaran, maka jumlah kader yang diundang dalam sosialisasi akan semakin banyak, jika perlu setiap

desa/kelurahan bisa dihadirkan. Dengan demikian, upaya pengurangan jumlah bayi penderita gizi buruk dan peningkatan ibu hamil memeriksakan kandungannya akan semakin efektif.

25. Sasaran Strategis meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
25.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Dukungan tokoh agama dan kerjasama dengan sektor terkait dalam pelaksanaan kegiatan

Permasalahan : Belum semua wilayah dapat terjangkau oleh kegiatan tersebut

Solusi : Pelaksanaan kegiatan bergiliran di setiap daerah untuk peningkatan akses pembinaan dan pelayanan.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan Rp 1.698.106.500 dengan realisasi anggaran RP 1.683.515.070 (99,14%).

26. Sasaran Strategis meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
26.	Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Pelaksanaan program dapat dilaksanakan berkat adanya koordinasi dengan sktor terkait

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah terkait dengan koordinasi dengan SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara (SKPD *leading sector*).

Alternatif solusi terkait permasalahan di atas adalah pelaksanaan koordinasi sejak awal dengan SKPD untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan kesiapan upacara.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah Rp 1.707.515.600 dengan realisasi anggaran RP 1.609.826.368 (94,28%).

27. Sasaran Strategis meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
27.	Meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	19 Jam/ Hari	19 Jam/ Hari	19 Jam/ Hari	100,00	19 Jam/ Hari	100,00	
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan	76 peserta	155 peserta	152 peserta	98,06	155 peserta	98,06	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						98,6	98,6		

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat hampir mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 98,6% (Sangat tinggi demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 98,6 (Sangat tinggi).

Permasalahan : Jumlah peserta pelatihan bidang kominfo dan kehumasan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan

Solusi : Perencanaan ulang terhadap peserta sasaran pelatihan

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Rp 130.729.000 dengan realisasi anggaran RP 128.005.875 (97,92%) dan Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Rp 79.915.000 dengan realisasi anggaran RP 79.349.950 (99,29%).

28. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
28.	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan kerjasama dengan media massa	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Seda
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00		100.00	

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Kerjasama yang baik dengan media massa dalam penyampaian berita dan informasi

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa Rp 1.056.854.000 dengan realisasi anggaran RP 992.138.025 (93,88%).

29. Sasaran Strategis meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
29.	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.	Opini BPK "WTP"	WTP	WTP	WTP	100.00	WTP	100.00	IKU Kab.
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00	IKU Setda
<i>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Strategis :</i>						100.00	100.00		

Bedasarkan tabel diatas capaian Sasaran Strategis meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target akhir Renstra pada tahun 2019 mencapai 100 % (Sangat tinggi).

Penunjang keberhasilan : Dukungan dari tiap SKPD khususnya dalam mewujudkan opini BPK "WTP"

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah :

1. Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah terbatas;
2. Pelaksanaan diklat seminar disesuaikan dengan jadwal KDH/WKDH;

Alternatif solusi terkait permasalahan-permasalahan di atas adalah:

1. Penambahan anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah terbatas;
2. Penggeseran antar rekening belanja.

Program yang menunjang pencapaian sasaran strategis adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.223.201.000 dengan realisasi anggaran RP. 5.797.402.081 (93,16 %), Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 280.538.300 dengan realisasi anggaran RP. 273.211.565, (97,39 %), dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 4.281.526.600 dengan realisasi anggaran RP. 34.155.943.846 (97,07 %).

Opini BPK 'WTP' pada tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai WTP (100%) dimana target yang ditetapkan adalah Opini BPK 'WTP'. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target Opini BPK 'WTP', maka capaian kinerja tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%.

Penghitungan Opini BPK 'WTP' untuk pengukuran indikator kinerja kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut :

Tabel 3.6
Penghitungan Opini BPK 'WTP' Kabupaten Magelang
Tahun 2018.

No.	Kategori Opini	Bobot Nilai
1	Wajar Tanpa Pengecualian	3
2	Wajar Dengan Pengecualian	2
3	Tidak Wajar	1
4	Tidak Menyatakan Pendapat	0

Upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan melalui c data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Penghitungan capaian kinerja : Target = WTP; Realisasi = WTP

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah bobot nilai Realisasi}}{\text{Jumlah bobot nilai target}} \times 100 \\
 &= \frac{WTP}{WTP} \times 100 \\
 &= \frac{(3+2+1+0)}{(3+2+1+0)} \times 100 \\
 &= \frac{6}{6} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.7
 Analisis efesiensi Penggunaan Sumberdaya pada
 Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efesiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Meningkatnya sistem pendaftaran tanah.	Persentase luas lahan bersertipikat	160,97%	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	42.496.000	40.164.460	94,51	5,49%
2	Meningkatnya koordinasi tertib administrasi pertanahan	Cakupan koordinasi tertib administrasi pertanahan	100%					
3	Menurunnya konflik dan permasalahan pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan tanah perseorangan	100%					
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	53.500.000	52.299.400	97,76	2,24%
		Aplikasi PATEN	100%					
5,	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah	152%	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	81.312.020	72.561.035	89,24	10,76%
6,	Meningkatnya tertib penataan batas antar wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi anatar pemerintah daerah	100%	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	39.861.000	1.832.948	4,60	95,4%
7,	Meningkatnya partisipasi	Cakupan kelompok	100%	Program Peningkatan	206.126.900	194.366.296	94,29	5,71%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	masyarakat dalam membangun desa		Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				
8,	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%					
9,	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%					
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah	Nilai AKIP Kabupaten	50%	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan **)	320.450.000	313.594.625	97,86	2,14%
11	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah	Cakupan penataan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	100%					
		Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III, dan IV dan terisinya jabatan fungsional	84,61%					
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Cakupan pedoman ketatalaksanaan yang tersusun,	100%	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	20 0 0	16,873,500	84,36	15,64%
		Persentase UPP yang nilai IKM-nya meningkat	100%	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan	80 0 0	70,348 0	87,94	12,06%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
				Prosedur Pengawasan				
13	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	Program peningkatan disiplin aparatur	90.850.000	90.603.100	99,73	0,27%
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur *)	257.916.000	182.298.119	70,68	29,32%
14	Meningkatnya kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan	100%	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,569,969 0	1,353,486,588	86,21	13,79%
15	Meningkatnya pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100%					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
16	Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	Website milik Pemda	100%					
17	Meningkatnya pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, energi dan sumberdaya mineral, serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,	Persentase desa tertib administrasi pelaksana raskin	0	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**)	0	0	0	0
		Persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa	60 %	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan **)	185,964 0	169,895,719	91,36	0
		Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	100%	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	120,219,100	101,897,921	84,76	15,24%
18	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase Peningkatan PAD	148,84%	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	530,734,600	499,102,415	94,04	5,96%
19	Meningkatnya kualitas	Cakupan pelaporan	100%					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan	keuangan dan kinerja		Keuangan Daerah **)				
20	Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah	Persentase peningkatan PAD	148,84%					
21	Meningkatnya kelancaran, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,782,015,500	1,666,597,136	93,52	6,48%
22	Meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan bagi masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	53.500.000	52.299.400	97,76	2,24
23	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan	Cakupan fasilitasi kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	100%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	165.000.000	164.957.650	99,97	0,03%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
24	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	Cakupan fasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana	100%	-	-	-		
25	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan dan kesenian	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	1.698.106.500	1.683.515.070	99,14	0,86%
26	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama, kebudayaan	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan	100%					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	dan kesenian							
27	Meningkatnya penyiapan dan pengaturan kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah	Cakupan pelayanan kedinasan	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.707.515.600	1.609.826.368	94,28	2,72%
28	Meningkatnya efektifitas publikasi pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	130.729.000	128.005.875	97,92	2,082%
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bidang kominfo dan kehumasan	98,06%	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi **)	79.915.000	79.349.950	99,29	0,71%
29	Meningkatnya kualitas analisis media dan informasi guna obyektivitas sajian informasi, berimbang dan bertanggungjawab dalam rangka membangun peningkatan kecerdasan dan daya kritis serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan kerjasama dengan media massa	100%	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	1.056.854.000	992.138.025	93,88	6,12%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	9	10
30	Meningkatnya pengelolaan persandian, pelayanan ke rumahtangga pimpinan, efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkup Sekretariat Daerah serta pelayanan administrasi keuangan lingkup pimpinan dan Sekretariat Daerah.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.223.201.000	5.797.402.081	93,16	6,84%
		Cakupan pengadaan pakaian dinas aparatur	100%					
		Opini BPK "WTP"	100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	280.538.300	273.211.565	97,39	2,61%
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.281.526.600	4.155.943.846	97,07	2,93%
Jumlah :					9.564.821.115	8.955.345.468	93,63	2,93%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tahun 2018, data diolah,

Catatan :

- *) Tidak ada efisiensi walau capaian kinerja $\geq 100\%$, karena terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan atau kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sangat rendah.
- ***) Tidak dilakukan penghitungan efisiensi, karena capaian kinerja sasaran tidak mencapai $\geq 100\%$.

Berdasarkan tabel efisiensi diatas rata-rata efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 2,93%, tetapi tingkat efisiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

C. Prestasi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang membuahkan hasil berupa prestasi sebagai berikut:

1. Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”;
2. Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori “Baik Dengan Catatan” Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Selaku Pembina BUMD, beberapa penghargaan diraih oleh Bapas 69, PDAM dan PD BPR BKK dalam beberapa kategori;
4. Piagam Penghargaan sebagai Juara III Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018; dan